

BAB V
KEBERHASILAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. Keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Keberhasilan atau Prestasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah dicapai selama ini merupakan kerja keras dan kerja cerdas dari Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Lintas Sektor, masyarakat dan seluruh SDM PSKS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan yang telah diraih sampai saat ini yaitu :

1. Sudah 10 Tahun yang lalu Kabupaten Kotawaringin Barat telah dinyatakan sebagai Daerah Bebas Komunitas Adat terpencil (KAT) atau **“Kotawaringin Barat Bebas KAT”**;
2. Pencapaian **“Kotawaringin Barat Bebas Prostitusi”** pada Tahun 2018 melalui kegiatan Penutupan lokasi prostitusi di Wilayah Kotawaringin Barat dan Pemulangan PSK ke daerah asal pada tanggal 15 Mei 2018, yang dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Sosial RI Bapak Idrus Marham, didampingi oleh Bupati, Ketua DPRD dan Lintas sektor terkait.
3. Terjalannya Advokasi dan Koordinasi yang terjalin dengan baik antara Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pemerintah Pusat/Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sehingga banyak bantuan pusat yang diberikan kepada pemerintah Kotawaringin Barat, diantaranya melalui Bantuan Mobilitas operasional, Bantuan KUBE Perkotaan, Pesisir dan bantuan sosial lainnya.
4. Kabupaten Kotawaringin Barat diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) pada tahun 2016;
5. Peserta Lomba Pilar-pilar berprestasi kategori Karang Taruna dari Kabupaten menjadi Juara I dan menerima penghargaan Tingkat Nasional di Jakarta pada tahun 2017;

6. Anak KPM PKH berprestasi provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 diraih oleh Ananda Jusmiyanti dari desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan menerima undangan untuk menerima penghargaan Tingkat Nasional pada acara Gebyar di Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 11-13 Agustus 2018.
7. Kelompok KUBE Telor dari Kabupaten kotawaringin Barat mendapatkan penghargaan sebagai KUBE Berprestasi dan dikirim untuk menerima penghargaan Tingkat Nasional pada acara Gebyar Prestasi Keluarga Sejahtera Indonesia di Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 11-13 Agustus 2018.
8. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi dari Kabupaten kotawaringin Barat menerima penghargaan Tingkat Nasional penghargaan pada acara Gebyar Prestasi Keluarga Sejahtera Indonesia di Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 11-13 Agustus 2018.
9. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 menjadi kabupaten pertama/percontohan untuk mengaplikasikan Sistem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pertama di Kalimantan Tengah.
10. Pada Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat didaulat oleh Kementerian Sosial RI sebagai kabupaten percontohan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Sehingga Kementerian Sosial telah memberikan Bantuan Gadget Tablet sebanyak 50 unit dan mendapatkan bantuan dana operasional pengembangan SLRT.

B. Tantangan Pengembangan Pelayanan pada Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Sosial diberikan kewenangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial. Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya pembangunan

kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.

Penanganan PMKS bukan hanya tugas Dinas Sosial semata namun perlu kerjasama lintas sektor dan stakeholder terkait. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Kotawaringin Barat jumlahnya cukup besar.

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
2. Masih tingginya PMKS di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami trend meningkat kasusnya.
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat secara maksimal mendukung penganggaran usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

6. Koordinasi dan kemitraan strategis belum maksimal antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak masyarakat, pihak swasta untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui CSR.
7. Belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.
8. Data keluarga penerima manfaat (KPM) harus terdata secara detail biodatanya/ by Name by Address (BNBA) dan by Nomor identitas kependudukan (NIK) dari mulai KPM di wilayah perkotaan, perdesaan maupun KPM yang berada di wilayah terpencil.
9. Tuntutan pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial yang profesional baik secara ilmu sosial maupun teknologi informatika, karena kedepan bantuan sosial pengelolaannya akan berbasis teknologi digital.
10. Penyaluran bantuan sosial kepada KPM berbasis teknologi sehingga penyalurannya berupa bantuan non tunai yang bekerjasama dengan pihak perbankan.
11. Belum tercapainya komitmen pemerintah daerah untuk menganggarkan dana sharing sebesar 5% dari Bantuan Pusat yang diberikan untuk Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH).
12. Pembangunan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Kotawaringin Barat di lokasi sebidang tanah yang telah dihibakan oleh Kelurahan Baru kepada Dinas Sosial pada tahun 2017.